

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)**

Jika dirunut ke belakang, PDI-P sebenarnya merupakan partai politik yang memiliki tali kesejarahan dengan partai politik pada masa orde lama. PDI-P sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973 dan merupakan hasil dari gagasan fusi partai politik.

Pada 7 Februari 1970, menjelang Pemilu 1971 yang diikuti oleh Sembilan partai politik dan Golongan Karya, Presiden Soeharto melakukan konsultasi kolektif dengan pimpinan Sembilan partai politik tersebut. Dalam konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada aspek material (kelompok material-spiritual) dan kelompok kedua menekankan pada aspek spiritual (kelompok spiritual-material). Keinginan pemerintah untuk melakukan pengelompokan partai menimbulkan perbedaan pendapat diantara elit partai dalam menyikapi gagasan mengenai fusi partai politik tersebut. Para elit partai yang mendukung gagasan tersebut melihatnya sebagai realitas yang memang harus dijalani mengingat konstelasi politik nasional yang terjadi. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaannya disebutkan

agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan.

Adapun partai politik yang dikelompokan dalam golongan material-spiritual terdiri dari partai-partai yang menekankan pembangunan material tanpa mengabaikan aspek spiritual. Partai politik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Pada tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946, di Kediri, PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau dikenal dengan Serrindo pada waktu itu, yaitu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri. Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme. PNI merupakan partai pemenang Pemilu dalam Pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,32% atau 57 kursi. Namun pada Pemilu 1971 PNI mengalami penurunan suara dengan hanya memperoleh 6,93% suara atau 20 kursi.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)

Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu. Parkindo berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto. Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Maschi) di Pematang Siantar. Pemilu 1955 Parkindo memperoleh 2,66% suara atau 8 kursi, sementara itu pada Pemilu 1971 Parkindo hanya memperoleh 1,34% suara atau 7 kursi.

### 3. Partai Katolik

Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepala Politik Katolik Djawi (PPKD). Pada Pemilu 1955 Partai Katolik mendapat 2,04% suara atau 6 kursi, sementara itu pada Pemilu 1971 Partai Katolik hanya meraih 1,11% suara sehingga di DPR mendapat 3 kursi.

### 4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirinya. Tokoh

dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955. IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum Pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut Pemilu 1955. Hasil Pemilu 1955 IPKI memperoleh 1,43% suara atau 4 kursi, sedangkan pada Pemilu 1971 hanya mampu memperoleh 0,62 % sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.

#### 5. Murba

Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka. Menurut data Kementerian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri". Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme. Pada Pemilu 1955 Murba memperoleh 0,53% suara atau 2 kursi, namun Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 0,09 % suara.

Kelompok kedua yang terumuskan dalam gagasan fusi adalah kelompok spiritual-material. Kelompok tersebut menekankan pada pembangunan spiritual

tanpa mengabaikan aspek material, partai-partai yang termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Nahdlatul Ulama (NU)

Awal lahirnya NU jika dilihat dari aspek sejarahnya merupakan hasil dari semangat Kebangkitan Nasional sekitar tahun 1908. NU secara resmi lahir sebagai suatu organisasi yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan ekonomi pada 31 Januari 1926. NU sebagai sebuah organisasi keagamaan seiring berjalannya waktu mulai berkiprah didunia politik praktis pada tahun 1945 dengan bersama-sama organisasi islam lainnya membentuk partai politik Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). Namun pada 1 Mei 1952 dalam Muktamar XIX NU di Palembang, secara resmi NU menyatakan keluar dari Masyumi dan mendeklarasikan dirinya sebagai partai politik. Hal tersebut dipicu lantaran kekecewaan NU lantaran sikap Masyumi yang tidak lagi menganggap Majelis Syuro sebagai dewan tertinggi dan hanya dijadikan sebagai dewan penasehat serta kekecewaan dalam hal distribusi kekuasaan<sup>1</sup>.

Sebagai partai politik NU menganut faham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dan berhaluan pada empat madzab dalam islam. NU menjadi kontestan Pemilu 1955 yang memperoleh hasil suara diperingkat ketiga setelah PNI dan Masyumi dengan mendapatkan 18,41% suara atau 45 kursi.

---

<sup>1</sup> Fuad Abdullah. (2015). *Fusi Partai-partai Islam Menjadi PPP Pada Masa Orde Baru (1971-1973)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Adapun hasil Pemilu 1971 NU menduduki peringkat kedua setelah Golkar dengan memperoleh 18,68% suara atau 58 kursi.

## 2. Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)

Awal kemunculan PERTI adalah di Minangkabau sebagai respon golongan tua terhadap golongan muda yang melakukan gerakan pembaharuan islam dengan tujuan mengubah tradisi terutama gerakan tarekat. Gerakan perubahan yang dilakukan adalah melalui Pendidikan, dakwah, media cetak dan perdebatan. Gerakan yang dilakukan golongan tua lebih berfokus pada Pendidikan dengan mendirikan Lembaga surau termasuk Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI). Pada 1930 para ulama yang tergabung dalam MTI bersepakat untuk mendirikan suatu wadah organisasi yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah yang disingkat PTI. Namun pada 11 Februari 1938 diperoleh kesepakatan bahwa singkatan dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah adalah PERTI. Pada 1944 PERTI bergabung dengan Majelis Islam Tinggi (MIT) yakni organisasi islam untuk seluruh wilayah Sumatera. MIT merupakan wadah untuk meruju berbagai macam persoalan agama namun pada berkembangnya berubah menjadi Masyumi cabang Sumatera. Karena hal tersebut maka PERTI keluar dari MIT yang dianggap sudah tidak berjalan sesuai *khittahnya*, untuk kemudian berdiri sendiri menjadi partai politik PERTI yang disahkan dalam kongresnya pada 24 Desember 1945 di Bukittinggi<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Ibid.

PERTI membawa paham *Ahlusunnah wal Jama'ah* dengan berhaluan pada madzab Imam Syafi'i. Sebagai partai politik PERTI menjadi kontestan Pemilu di Indonesia sebanyak dua kali. Pemilu 1955 memperoleh 1,28% suara yaitu 4 kursi, sedangkan Pemilu 1971 memperoleh 0,69% suara atau sebanyak 2 kursi.

### 3. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)

Nama Sarekat Islam tentunya mewarnai pergerakan nasional, terlebih pada masa kepemimpinan Tjokroaminoto. Berbagai polemik yang terjadi ditubuh SI membuat Tjokroaminoto berkeinginan memperkuat basis organisasi dengan merubahnya ke partai politik. Nuansa disiplin yang rendah dalam konsep sarekat membuatnya berniat mengubah nama sarekat menjadi partai agar meningkatkan disiplin organisasi, selain itu juga bertujuan guna merapatkan barisan menghadapi pemerintah dan PKI. Maka berubahlah SI menjadi PSI (Partai Sarekat Islam). Karena PSI berasaskan islam, maka dinilai tidak dapat mengakomodir konsep nasionalisme dan cinta Tanah Air. Atas dasar hal tersebut maka pada Kongres Nasional PSI ke XIV di Jakarta tahun 1929 PSI memutuskan berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII)<sup>3</sup>.

Walaupun asas partai tetap islam namun diharapkan dengan pergantian nama tersebut dapat memperluas basis masa partai dengan memasukan unsur nasionalisme dalam kata Indonesia di dalamnya. Pada Pemilu 1955 PSII memperoleh dukungan sebanyak 2,89% suara yakni

---

<sup>3</sup> Ibid.

mendapat 8 kursi dan pada Pemilu 1971 mengalami peningkatan perolehan jumlah kursi yakni menjadi 10 kursi dengan total suara sebanyak 2,39%.

#### 4. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)

Bubarnya Masyumi pada era orde lama tidak membuat tokoh-tokoh partai tersebut diam dan menerima. Semangat para tokoh-tokoh Masyumi melatarbelakangi usaha didirikanya partai politik baru yang dapat melanjutkan konsep yang telah dirumuskan Masyumi. Usaha yang dilakukan para tokoh tersebut adalah dengan membentuk Badan Kordinasi Amal Muslimin (BKAM) pada tahun 1965. Pada 7 Mei 1967 dalam sidang badan tersebut didirikan panitia tujuh yang bertugas melakukan usaha menuju terciptanya partai politik baru<sup>4</sup>. Usaha tersebut dilakukan dengan masif dan penuh perjuangan sampai pada akhirnya pemerintah memberikan izin didirikanya partai politik yang dapat menampung aspirasi umat islam khususnya bekas konstituen dari Masyumi namun dengan persyaratan bahwa para mantan pemimpin Masyumi tidak boleh menduduki jabatan penting dalam partai baru yang terbentuk nantinya. Pada 20 Februari 1968 melalui Keputusan Presiden No.70 lahirlah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)<sup>5</sup>. Partai tersebut tetap membawa nafas islam sebagai dasar perjuangannya. Selanjutnya PARMUSI menjadi kontestan Pemilu 1971 dengan memperoleh 5,36% suara dan berhasil mendapatkan 24 kursi parlemen.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

Perundingan yang dilakukan Soeharto dengan sembilan partai politik yang disebutkan di atas dilakukan secara massif sebelum dan sesudah Pemilu 1971. Hasil Pemilu 1971 semakin menguatkan banyak pihak untuk menyepakati gagasan tentang pengelompokan partai politik tersebut meskipun pihak yang kontra masih tetap ada. Adapun hasil Pemilu 1971 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perolehan Kursi DPR Pemilu 1971**

No.	Nama Partai Politik	%	Jumlah Kursi
1.	Golkar	62,80	227
2.	NU	18,67	58
3.	Parmusi	5,36	24
4.	PNI	6,94	20
5.	PSII	2,39	10
6.	Parkindo	1,34	7
7.	Partai Katolik	1,10	3
8.	Perti	0,70	2
9.	IPKI	0,62	0
10.	Murba	0,09	0
Jumlah		100,00	351

Sumber: Kompas, 9 Agustus 1971. Dalam Widjanarko Puspoyo. 2012. Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009. Solo. Era Adicitra Intermedia

Hasil Pemilu 1971 tersebut memperlihatkan bahwa Golkar sebagai pendatang baru mampu menyingkirkan partai-partai besar yang sebelumnya menjadi jawara di Pemilu 1955 seperti PNI dan NU. Isu pembangunan yang dibawa

oleh Golkar seolah menjadi magnet kuat bagi masyarakat untuk kemudian memilihnya, terlebih disandingkan dengan ketidakmampuan Sembilan partai politik peserta Pemilu 1971 dalam hal *counter* isu pembangunan tersebut. Selain itu, banyak kalangan yang menilai bahwa trauma masyarakat atas peristiwa G30S juga yang menjadi pendongkrak suara Golkar. Masyarakat tahu bagaimana pemerintah terutama melalui ABRI memperlakukan orang-orang yang dinilai terlibat peristiwa G30S dan Golkar identik dengan pemerintah sehingga masyarakat memiliki ketakutan sendiri jika tidak memilih Golkar. Hal lain yang membuat suara Golkar melambung tinggi adalah dikeluarkannya Permendagri No. 12 Tahun 1970, peraturan tersebut mewajibkan seluruh pegawai negeri untuk loyal terhadap pemerintah, termasuk didalamnya dalam hal memenangkan Golkar<sup>6</sup>.

Realitas yang terjadi sebelum maupun sesudah Pemilu 1971 tersebut membuat banyak elit partai politik menyepakati ide mengenai pengelompokan partai yang disampaikan Soeharto sebelum Pemilu berlangsung. Kelompok material-spiritual yang terdiri dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI dan Murba pada 24 Maret 1970 bersepakat untuk memberikan nama Kelompok Demokrasi Pembangunan dengan bentuk Badan Kerjasama<sup>7</sup>. Perbedaan orientasi ideologi yang ada dalam kelompok tersebut diatasi dengan menyebutkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pengelompokan. Untuk kelompok spiritual-material yang terdiri dari NU, Perti, PSII dan Parmusi pada 13 Maret 1970 bergabung dalam nama

---

<sup>6</sup> Widjanarko Puspoyo. 2012. *Dari Sukarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955-2009*. Solo. Era Adicitra Intermedia. Hlm.119

<sup>7</sup> Retor A.W Kaligis. (2014). *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDIP*. Tangerang: Margin Kiri. Hlm.87

Kelompok Persatuan Pembangunan. Pengelompokan yang dilakukan belum berarti menjadikan partai-partai yang ada sebagai satu kekuatan politik karena masing-masing dari mereka masih memiliki hak kepartaian penuh terlebih masing-masing dari mereka menjadi kontestan Pemilu 1971.

Gagasan mengenai fusi lebih lanjut terealisasi setelah Pemilu 1971. Melalui proses perumusan yang panjang antar tokoh kelima partai politik kelompok material-spiritual, pada 10 Januari 1973 secara resmi lima partai politik yang tergabung dalam Kelompok Demokrasi Pembangunan melakukan fusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Untuk kelompok spiritual-material fusi dideklarasikan kelompok tersebut pada 5 Januari 1973 dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mengingat penelitian ini akan membahas tentang studi orientasi ideologi marhaenisme dalam DPD PDI-P Jawa Tengah, maka pembahasan akan dikerucutkan pada hasil fusi kelompok material-spiritual yakni lebih khusus pembahasan mengenai PDI. Setelah mendeklarasikan diri dalam fusi partai menjadi PDI, di dalamnya terjadi berbagai macam konflik internal partai yang berkepanjangan. Pada masa awal, konflik yang terjadi adalah konflik ideologis dimana lima partai yang memfusikan diri di dalamnya saling adu argumen mengenai dasar perjuangan, watak maupun ciri partai yang akan dikenakan oleh PDI.

Desukarnoisasi yang terus bergulir pada masa orde baru membuat marhaenisme tidak mungkin dijadikan sebagai asas PDI. Karena hal tersebut

identitas keberpihakan partai pada rakyat ditunjukkan melalui istilah *wong cilik* yang sejak akhir 1980 PDI populerkan. Istilah tersebut dipandang cukup aman digunakan dan cukup netral dari unsur PNI serta orde lama. Istilah *wong cilik* dimaknai partai sebagai *marhaen*, yakni kelas kepemilikan negatif yang mengalami penutupan sosial dengan cara-cara pengucilan berkaitan dengan penggunaan kekuasaan serta mengalami operasi ideologi kelas dominan yang mengeksploitasi sumber daya ekonomi dan penempatan penduduk sebagai sumber tenaga kerja murah, sehingga terjadi marjinalisasi ekonomi<sup>8</sup>. Dalam menjalankan program-programnya PDI terkendala masalah sumber daya manusia. Pada saat itu kaderisasi tidak menjadi prioritas utama dalam organisasi karena terbentur masalah pendanaan dan belum adanya pola kaderisasi yang baku.

Dilihat dari sejarahnya PDI dikenal sebagai partai yang sering berkonflik, konflik yang terjadi didominasi oleh konflik internal partai dimana pada saat itu pihak-pihak yang tidak disukai pemerintah secara otomatis akan tersingkir dari partai. Keterlibatan pemerintah orde baru yang terpusat pada Soeharto mengambil peran yang sangat berpengaruh pada tubuh PDI. Hal tersebut terlihat dari sikap orde baru yang selalu berperan penting dalam menentukan ketua umum DPP PDI dan mengintervensi melalui forum resmi partai. Dampaknya adalah ketidakmampuan internal PDI menjalankan fungsi kontrol politik menghadapi kekuatan eksternal.

Sentralisme orde baru menemui titik tantangan ketika Megawati tampil sebagai ketua umum PDI. Menjadi sebuah tantangan lantaran Megawati menjadi

---

<sup>8</sup> Retor A.W. Kaligis, *Marhaen dan Wong Cilik : Membedah Wacana dan Praktik Nasionalisme bagi Rakyat Kecil dari PNI sampai PDI Perjuangan*, (Tangerang : Margin Kiri, 2014), hlm 300.

satu-satunya ketua umum organisasi sosial politik yang terpilih tanpa restu orde baru, hal tersebut terjadi lantaran dukungan terhadap Megawati sendiri tidak dapat dibendung pada akhir tahun 1993. Pemerintah tidak diam melihat hal tersebut terjadi, pemerintah pada tahun 1996 merekayasa adanya kongres dengan menampilkan Soerjadi sebagai ketua umum PDI namun ditolak oleh pendukung Megawati, sehingga terjadi perselisihan arus bawah dan arus atas yang cukup signifikan. Dititik tersebut pemerintah mengambil resiko dengan mendukung pengambilalihan kantor DPP PDI secara paksa dan pada tanggal 27 Juni 1996 untuk pertama kalinya dalam keberjalanan orde baru mengambil jalan kekerasan dan kerusuhan dalam menangani persoalan internal partai politik.

Dukungan dari elemen masyarakat kepada Megawati semakin tak terbendung, hal tersebut lantaran harapan dari masyarakat untuk adanya semangat perlawanan menuju demokrasi yang dinilai terbelenggu oleh orde baru. Mereka bahkan mengabaikan perbedaan kepentingan politik dan ideologi demi tujuan menghadapi kekuasaan pemerintah. Megawati sebagai putri Sukarno dinilai sebagai suatu faktor yang dapat mengubah konstelasi politik dan kepemimpinan nasional orde baru.

PDI pimpinan Megawati melihat bahwasanya pergantian pemimpin harus dilakukan dengan jalan konstitusional. Namun menjelang Pemilu 1999, langkah PDI terhalang karena pada saat itu pemerintahan Habibie masih mengakui PDI pimpinan Soerjadi. Sementara itu UU No. 3 tahun 1999 mengatakan bahwa tidak boleh partai peserta pemilu memiliki nama ataupun lambang yang sama. Karena hal tersebut maka PDI pimpinan Megawati memutuskan untuk menambah kata

“Perjuangan” didalamnya, sehingga menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

PDI-P sebagai kelanjutan dari PDI meneruskan tiga watak dan ciri partai yaitu demokrasi Indonesia, kebangsaan Indonesia dan keadilan sosial. Pada Pemilu 1999, PDI-P memperoleh peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Meski demikian, PDI-P gagal membawa Megawati menduduki kursi kepresidenan karena kalah voting dengan Abdurrahman Wahid dalam Sidang Umum MPR 1999. Meski demikian, Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI-P, pengurus DPP PDI-P memutuskan melaksanakan Kongres I PDI-P meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003. Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi pascaterpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI. Kongres I PDI-P diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah.

Menjelang Kongres I PDI-P, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI-P, nama yang muncul antara lain Dimiyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain

yaitu DPC Kota Jayapura. Dalam pandangan umumnya, DPC Kota Jayapura mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimiyati Hartono dan Eros Jarot.

Kongres I PDI-P akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan. Sebab, sebanyak 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI-P. Setelah Kongres I PDI-P tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke-5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI.

Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke-5 membawa perubahan pada sikap politik PDI-P dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI-P. Meski sebagai partai penguasa, PDI-P ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004. PDI-P hanya mampu memperoleh suara di urutan kedua dengan perolehan 109 kursi di DPR.

Kongres II PDI-P diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998. Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005. Menjelang Kongres II PDI-P diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI-P antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat

Ketua DPD PDI-P Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan.

Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu, kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta, salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI-P" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI-P yaitu Guruh Sukarno Putra. Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta *walk out* dari arena sidang. Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk. Ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.

Kongres II PDI-P akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI-P periode 2005-2010.

Dalam kongres III PDI-P tahun 2010, Megawati kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum periode 2010-2015. Kongres IV PDI-P yang dilaksanakan di Sanur, Bali pada tanggal 9 – 11 April 2015 menempatkan Megawati

kembali sebagai Ketua Umum PDI-P periode 2015-2020. Berikut merupakan struktur DPP PDI-P periode 2015-2020 hasil Kongres IV di Bali:

**Tabel 2.2**  
**Struktur DPP PDI-P Periode 2015-2020**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>
<b>Ketua umum</b>	<b>Megawati Soekarnoputri</b>
Ketua Bidang Kehormatan Partai	Komarudin Watubun
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu	Drs. Bambang Dwi Hartanto
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi	Idham Samawi
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi	Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Politik dan Keamanan	Puan Maharani (non-aktif)
Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundangan	Trimedya Panjaitan
Ketua Bidang Perekonomian	Hendrawan pratikno
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	M. Prakosa
Ketua Bidang Kemaritiman	Rokhim Dahuri
Ketua Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Andreas H Pareira
Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana	Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Buruh, Tani dan Nelayan	Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak	Sri Rahayu
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	I Made Urip
Ketua Bidang Koperasi UMKM	Nusirwan Sudjono
Ketua Bidang Pariwisata	Sarwo Budi Yanti
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga	Syukur Nababan
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif	M. Prananda
<b>Sekretaris Jenderal</b>	<b>Hasto Kristiyanto</b>
Wakil Sekretaris Bidang Internal	Utut Adianto
Wakil Sekretaris Bidang Program Kerakyatan	Eriko Sutarduga
Wakil Sekretaris Bidang pemerintahan	Ahmad Basarah
<b>Bendahara Umum</b>	<b>Olly Dodo Kambey</b>
Wakil Bendahara Bidang Internal	Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Program	Juliari Piter Batubara

Sumber: pdi-perjuangan.org

## 2.2 PDI-P Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang letaknya cukup strategis karena berada di daratan padat Pulau Jawa dan diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur serta Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, luas wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar 32.544,12 Hektar (Ha) dan terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota dengan 573 Kecamatan serta 8.568 desa/kelurahan.

Provinsi Jawa Tengah dijuluki sebagai *Kandang Banteng* lantaran PDI-P merupakan partai yang memiliki banyak pendukung didalamnya. Besarnya dukungan ini terlihat dari jumlah kursi PDI-P di DPRD Jawa Tengah yang selalu berada di peringkat pertama. Pemilu langsung merupakan perwujudan kongret dari demokrasi, dimana masyarakat tanpa perantara secara sadar memilih wakilnya untuk duduk di parlemen menjadi perhelatan akbar partai politik untuk menunjukkan keberadaannya. Pemilu langsung yang terselenggara pada tahun 2004, 2009 dan 2014 di wilayah Jawa Tengah menyajikan hasil bahwa PDI-P sebagai partai politik masih diakui keberadaannya dengan konsisten menjadi peraih kursi terbanyak di DPRD Jawa Tengah. Hal tersebut juga yang berhasil membuat citra *Kandang Banteng* untuk wilayah Jawa Tengah belum terhapuskan.

**Tabel 2.3****Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah Pemilu 2004, 2009 dan 2014**

Partai Politik	Perolehan Kursi DPRD Jawa Tengah		
	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014
PDI-P	31	23	27
Partai Golkar	18	11	10
PKB	15	9	13
Partai Gerindra	-	9	11
PAN	10	10	8
PPP	10	7	8
Partai Demokrat	9	16	9
PKS	7	10	10
Partai Nasdem	-	-	4
Partai Hanura	-	4	-
PKNU	-	1	-

Sumber: [jateng.kpu.go.id](http://jateng.kpu.go.id)

Data di atas memperlihatkan bahwa dalam Pemilu 2004 PDI-P berhasil menduduki 31 kursi DPRD Jawa Tengah. Meskipun mengalami penurunan, dimana pada tahun 1999 PDI-P di Jawa Tengah berhasil menduduki 37 kursi namun di 2004 PDI-P tetap memperoleh suara terbanyak dengan nyaris menang di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari total 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Jawa Tengah, PDI-P menang di 24 kabupaten dan 4 kota. Sisanya dimenangkan Partai Golkar (Rembang dan Kota Salatiga), PKB (Tegal, Pekalongan, dan Kudus), dan PPP (Jepara dan Kota Pekalongan).

Dalam Pemilu Legislatif pada 9 April 2009, PDI-P masih menempati posisi teratas di Jawa Tengah meski kembali mengalami penurunan perolehan suara. PDI-P Jateng hanya mampu memperoleh sebanyak 23 kursi di DPRD Jawa Tengah atau memenangkan suara sebanyak 3.305.944 suara dari 26, 2 juta pemilih di sepuluh daerah pemilihan (Dapil). Jumlah ini juga menunjukkan perolehan kursi PDI-P di Jawa Tengah mengalami penurunan sebanyak delapan kursi dibandingkan pada Pemilu Legislatif 2004 lalu yang mencapai 31 kursi.

Pada Pemilu 2014 PDI-P unggul di 8 dapil dari keseluruhan total 10 dapil di Jawa Tengah dengan meraih 27 kursi di DPRD Jawa Tengah, sementara untuk total suara yang dikantongi adalah sebanyak 4.295.598 suara. Terjadi kenaikan jumlah perolehan kursi DPRD Jawa Tengah jika dibandingkan dengan Pemilu 2009 yang hanya memperoleh 23 kursi.

Konstelasi peta politik PDI-P menyajikan gambaran yang menarik. Meskipun pada 2004 mengalami penurunan sebanyak 6 kursi namun PDI-P tetap menjadi partai yang paling banyak menduduki kursi DPRD Jawa Tengah. Selain hal tersebut, julukan *Kandang Banteng* pada Jawa Tengah semakin menguat ketika PDI-P selalu memenangkan kadernya yang maju menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. PDI-P Jawa Tengah berhasil menempatkan Mardiyanto yang berpasangan dengan Ali Mufiz untuk menduduki kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng periode 2003 - 2008.

Dalam Pemilihan Gubernur Jateng 2008, PDI-P juga berhasil menempatkan calon yang diusungnya yakni Bibit Waluyo – Rustriningsih sebagai Gubernur dan

Wakil Gubernur periode 2008-2013. Pasangan yang diusung PDI-P tanpa koalisi ini mampu memenangkan Pilgub dengan angka kemenangan mutlak sebesar 43,44 persen atau sebesar 6.048.261 suara dari 26 juta pemilih terdaftar di DPT Pilgub. Pasangan ini berhasil meraih angka penuh mengalahkan empat pasangan lainnya dengan memenangkan pertarungan dalam satu kali putaran.

Pada pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2013 PDI-P kembali mengusung kadernya sebagai calon Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo anggota DPR RI fraksi PDI-P berpasangan dengan Heru Sudjatmoko Bupati Purbalingga. Dalam Pilkada tersebut PDI-P tidak berkoalisi dengan partai lain dan dapat memenangkan pasangan Ganjar-Heru dengan perolehan suara sebesar 6.962.417 (48.82%). Pasangan Ganjar-Heru mengalahkan dua calon gubernur lainnya yakni pasangan Hadi Prabowo – Don Murdono yang diusung PKS, Partai Gerindra, PKB, PPP, Hanura PKNU yang memperoleh total suara 20.92% serta mengalahkan pasangan Bibit Waluyo – Sudijono yang diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN yang mengantongi total suara 30.26%.

Pilkada serentak tahun 2018 PDI-P kembali mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Gubernur Jawa Tengah periode 2018 – 2023. Petahana tersebut didampingi oleh Taj Yasin yang sebelumnya berstatus sebagai anggota komisi E DPRD Jawa Tengah fraksi PPP dari Dapil 3 Jawa Tengah. Pada pilkada serentak tersebut terdapat dua kandidat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, PDI-P berkoalisi dengan PPP, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan partai Golkar untuk mengusung pasangan Ganjar – Taj Yasin yang mendapat nomor urut satu. Sementara itu, pasangan nomor urut dua yakni Sudirman Said selaku mantan

Menteri ESDM berpasangan dengan Ida Fauziyah anggota DPR RI fraksi PKB. Pasangan Sudirman – Ida diusung oleh PKB, PKS, PAN dan Partai Gerindra.

Hasil Pemilu resmi yang dikeluarkan oleh KPUD Jawa Tengah pada Pilkada serentak 2018 tersebut menyatakan bahwa Ganjar – Taj Yasin sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Pemenang Pilkada. Total suara yang dikantongi pasangan Ganjar – Taj Yasin adalah 10.362.694 suara (58.78%) sementara pasangan Sudirman – Ida mengantongi 7.267.993 suara (41.22%) dari total DPT 27.216.491 dengan angka partisipasi sebesar 67.64%.

Secara struktural PDI-P memiliki enam tingkatan yaitu dari DPP, DPD, DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting. DPD PDI-P mengkoordinir struktural dibawahnya yang terdiri dari DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting serta menjadi jembatan struktural dibawahnya ketingkatan pusat yakni DPP PDI-P. Berikut merupakan data struktural dibawah DPD PDI-P Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 2.4****Data Struktural PDI-P Jawa Tengah**

No.	DPC tiap Kab/Kota	Jumlah		Jumlah	
		Kecamatan	PAC	Desa/kelurahan	Ranting
1.	DPC PDI-P Kab. Cilacap	24	24	284	284
2.	DPC PDI-P Kab. Banyumas	27	27	331	331
3.	DPC PDI-P Kab. Purbalingga	18	18	239	239
4.	DPC PDI-P Kab. Banjarnegara	20	20	278	278
5.	DPC PDI-P Kab. Kebumen	26	26	460	460
6.	DPC PDI-P Kab. Purworejo	16	16	494	494
7.	DPC PDI-P Kab. Wonosobo	15	15	265	265
8.	DPC PDI-P Kab. Magelang	21	21	372	372
9.	DPC PDI-P Kab. Boyolali	19	19	267	267
10.	DPC PDI-P Kab. Klaten	26	26	401	401
11.	DPC PDI-P Kab. Sukoharjo	12	12	167	167
12.	DPC PDI-P Kab. Wonogiri	25	25	294	294
13.	DPC PDI-P Kab. Karanganyar	17	17	177	177
14.	DPC PDI-P Kab. Sragen	20	20	208	208
15.	DPC PDI-P Kab. Grobogan	19	19	280	280
16.	DPC PDI-P Kab. Blora	16	16	295	295
17.	DPC PDI-P Kab. Rembang	14	14	294	294
18.	DPC PDI-P Kab. Pati	21	21	406	406
19.	DPC PDI-P Kab. Kudus	9	9	132	132
20.	DPC PDI-P Kab. Jepara	16	16	195	195
21.	DPC PDI-P Kab. Demak	14	14	249	249
22.	DPC PDI-P Kab. Semarang	19	19	235	235
23.	DPC PDI-P Kab. Temanggung	20	20	289	289
24.	DPC PDI-P Kab. Kendal	20	20	286	286
25.	DPC PDI-P Kab. Batang	15	15	248	248
26.	DPC PDI-P Kab. Pekalongan	19	19	285	285
27.	DPC PDI-P Kab. Pemalang	14	14	222	222
28.	DPC PDI-P Kab. Tegal	18	18	287	287
29.	DPC PDI-P Kab. Brebes	17	17	297	297
30.	DPC PDI-P Kota Magelang	3	3	17	17
31.	DPC PDI-P Kota Surakarta	5	5	51	51
32.	DPC PDI-P Kota Salatiga	4	4	22	22
33.	DPC PDI-P Kota Semarang	16	16	177	177
34.	DPC PDI-P Kota Pekalongan	4	4	47	47
35.	DPC PDI-P Kota Tegal	4	4	4	4

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Data diatas memperlihatkan bahwa PDI-P Jawa Tengah memiliki struktur yang lengkap diseluruh wilayah jenjang administrasi pemerintahan. Dewan Pimpinan Cabang yang selanjutnya disebut DPC partai berada di 35

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Pengurus Anak Cabang yang selanjutnya disebut PAC partai ada di tiap wilayah administrasi pemerintah kecamatan yang ada di Jawa Tengah yakni sebanyak 573 wilayah dan Pengurus Ranting yang meliputi wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan tersebar diseluruh desa/kelurahan yang ada di Jawa Tengah yakni sebanyak 8.555 desa/kelurahan. Adapun pengurus anak ranting sudah tersebar di tiap dusun/dukuh/RW/sebutan lainya di tiap desa. Hal tersebut menggambarkan bahwasanya PDI-P Jawa Tengah yang secara wilayah struktural dipimpin oleh DPD PDI-P Jawa Tengah telah mengindahkan Pasal 4 Anggaran Dasar Partai PDI-P hasil Kongres IV bahwasanya wilayah partai meliputi seluruh wilayah NKRI yang terstruktur sesuai wilayah jenjang administrasi pemerintahan. Selain itu, terpenuhinya struktur kepengurusan partai di tiap tingkatan administrasi pemerintahan menjadi salah satu elemen pendukung sehat atau tidaknya sebuah organisasi. PDI-P sebagai organisasi partai tidak terlepas dari kaidah kehidupan berorganisasi yang mengharuskan terpenuhinya struktur kepengurusan di tiap wilayah administrasi pemerintahan yang ada di Jawa Tengah agar alur Kordinasi dan Komunikasi tidak bias serta tercapainya Kolaborasi di tiap tingkatan dalam upaya mencapai tujuan partai.

Secara organisasi, pembentukan struktur pengurus DPD PDI-P Jawa Tengah melalui mekanisme berjenjang. Adapun forum permusyawaratan sesuai jenjang kewilayahan dimulai dari Musyawarah Anggota anak Ranting, Musyawarah Ranting (Musyran), Musyawarah Anak Cabang (Musyancab), Konferensi Cabang (Konfercab), Konferensi Daerah (Konferda) dan Kongres.

Forum tersebut memiliki wewenang dalam membahas program kerja, pembentukan struktur kepengurusan dan penilaian pertanggungjawaban pengurus.

Ketua DPD PDI Jawa Tengah dipilih dalam forum Konferda dimana nama calon ketua yang ada berdasarkan usulan yang ada di Musyancab dan Konfercab untuk kemudian calon-calon yang diusulkan melakukan tes di DPP PDI-P dan selanjutnya DPP PDI-P mengeluarkan rekomendasi calon ketua DPD PDI-P Jawa Tengah yang nantinya dibahas dalam forum Konferda. Pengambilan keputusan dalam setiap forum partai dilakukan dengan jalan Musyawarah Mufakat, hal tersebut dilakukan sebagai upaya PDI-P dalam mengindahkan konsep demokrasi khususnya Demokrasi Terpimpin hasil pemikiran Sukarno. Upaya tersebut jelas termaktub dalam AD/ART PDI-P Pasal 69 dimana pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat, apabila tidak tercapai mufakat maka dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.

Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah pertama kali terumuskan dalam forum Konferda pada Juli 2000 bertempat di Hotel Patrajasa Semarang. Dalam forum Konferda tersebut seluruh cabang mufakat untuk memilih Mardijo sebagai ketua DPD PDI-P periode 2000-2005. Namun ditengah kepengurusannya dilakukan Konferdasus pada tahun 2003 dan menetapkan Murdoko sebagai ketua DPD PDI-P Jawa Tengah pengganti Mardijo. Konferdasus tersebut digelar setelah Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah sebelumnya Mardijo dipecat karena tidak mengindahkan instruksi DPP PDI-P dalam Pemilihan Gubernur Jawa Tengah periode 2003-2008. Mardijo melanggar rekomendasi yang dikeluarkan DPP PDI-P terkait calon gubernur Jawa Tengah. Rekomendasi tersebut

turun untuk Mardiyanto namun Mardijo tetap mencalonkan diri sebagai calon gubernur, pada saat itu tahun 2003 pemilihan gubernur masih melalui parlemen. Pemecatan tersebut dilakukan pada ketua dan sekretaris DPD PDI-P Jawa Tengah yakni Mardijo dan Wuwuh Beno Nugroho selaku pihak yang bertanggungjawab.

Konferda ke-dua dilaksanakan tahun 2005 bertempat di Dimond Convention Hall Solo. Pada saat itu rekomendasi calon ketua DPD PDI-P Jawa Tengah turun untuk tiga orang yaitu Murdoko, Agus Cokro dan G. Rupriatono. Hasilnya adalah cabang-cabang sepakat untuk memilih Murdoko kembali menjadi ketua.

Konferda ke-tiga tahun 2010 yang pada saat itu bertempat di Panti Marhaen membahas kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah untuk periode 2010-2015. Hasilnya adalah cabang diseluruh wilayah Jawa Tengah mufakat untuk memilih Murdoko kembali sebagai ketua. Namun dalam periode ketiga masa kepemimpinannya tepatnya ditahun 2012, Beliau terjerat masalah hukum dari kasus korupsi dana kas daerah Kendal yang dilakukanya dan divonis 2 tahun 6 bulan penjara.

Akibat dari kasus hukum yang menjerat Murdoko maka kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah untuk periode 2010-2015 mengalami tiga kali pergantian pucuk pimpinan. Diawal kepengurusan jabatan ketua dipegang oleh Murdoko. Namun karena tersangkut masalah hukum Murdoko digantikan oleh utusan dari DPP PDI-P yakni salah satu pengurus DPP Muhammad Prakosa sebagai PLH ketua DPD PDI-P Jawa Tengah yang kemudian definitif dan digantikan oleh Heru

Sudjatmoko, Bupati Purbalingga tahun 2010-2013 yang kemudian maju sebagai kandidat calon wakil Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDI-P mendampingi Ganjar Pranowo di Pilkada tahun 2013.

Konferda ke-empat dilaksanakan pada tahun Juli 2015 dimana Bambang Wuryanto atau lebih akrab dalam panggilan Bambang Pacul terpilih sebagai ketua DPD PDI-P Jawa Tengah. Dalam forum Konferda tersebut terdapat tiga calon ketua yakni Bambang Wuryanto, Agustina Wiludjeng dan ketua periode sebelumnya yakni Heru Sudjatmoko.

Empat kali Konferda yang dilakukan namun terdapat enam kali pergantian kepengurusan inti DPD PDI-P Jawa Tengah lantaran beberapa kasus yang telah disebutkan diatas. Berikut merupakan tabel komposisi pengurus inti DPD PDI-P Jawa Tengah.

**Tabel 2.5****Komposisi Pengurus Inti DPD PDI-P Jawa Tengah**

Periode	Jabatan		
	Ketua	Sekretaris	Bendahara
2000 – 2003	Mardijo	Wuwuh Beno N.	Supito
2003 – 2005	Murdoko	Maulen Sinaga	Supito
2005 – 2010	Murdoko	Nuniek Sri Y.	Rukma Setyabudi
2010 – 2013	Murdoko	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2013 – 2014	M. Prakosa	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2014 – 2015	Heru Sudjatmiko	Agustina W.	Rukma Setyabudi
2015 – 2020	Bambang W.	Bambang K.	Agustina W.

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Kepengurusan DPD PDI-P dari tabel diatas memperlihatkan adanya tujuh kali pergantian pengurus dari empat periode kepengurusan. Hal lain yang menarik adalah dalam kepengurusan tersebut beberapa nama mengisi kepengurusan lebih dari satu periode. Hal ini seolah menjadi sebuah paradoks antara kepercayaan pengurus maupun anggota PDI-P Jawa Tengah yang tinggi terhadap orang yang bersangkutan atau justru terjadi krisis kader dalam kepemimpinan organisasi. Menjadi sebuah peluang besar ketika memang kepercayaan terhadap beberapa orang tinggi lantaran kualitasnya menggerakkan PDI-P Jawa Tengah dalam konteks organisasi politik memang baik. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya kaderisasi yang diterapkan cukup berdampak positif untuk keberjalanan organisasi, namun pada kenyataanya beberapa nama yang menjabat sebagai pimpinan DPD PDI-P Jawa Tengah justru menanggalkan jabatannya karena suatu pelanggaran aturan dan

kasus hukum. Hal tersebut menjadi bukti bahwasanya Pendidikan ideologis yang diterapkan belum sepenuhnya dijadikan pegangan masing-masing kader dalam bergerak.

Ideologi yang menjadi salah satu nilai tawar yang tinggi bagi PDI-P sudah sepantasnya dipegang teguh oleh masing-masing kader maupun anggota. Penyelewengan tindakan kader dan anggota dalam konteks organisasi maupun ideologi merupakan salah satu *output* dari proses kaderisasi yang dilakukan partai terhadap anggota dan kadernya.

AD/ART PDI-P pasal 87 tentang Kaderisasi Partai secara jelas menyebutkan bahwa kaderisasi berjenjang diterapkan oleh PDI-P. kaderisasi berjenjang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Kader tingkat Pratama, dilaksanakan oleh DPC partai dan melaporkannya pada DPD partai
2. Pendidikan Kader tingkat Madya, dilaksanakan oleh DPD partai dan melaporkannya pada DPP partai
3. Pendidikan Kader tingkat Utama, dilaksanakan oleh DPP partai

DPD PDI-P Jawa Tengah sendiri secara tidak tertulis menerapkan aturan bahwasanya seluruh ketua PAC PDI-P Jawa Tengah minimal telah menempuh Pendidikan Kader tingkat Pratama, begitupun ketua DPC yang harus menempuh Pendidikan Kader tingkat Madya dan ketua DPD menempuh Pendidikan Kader tingkat Utama. Namun keberjalanannya masih masih terdapat beberapa ketua PAC dan DPC yang belum menempuh proses kaderisasi tersebut.

Wawancara yang dilakukan dengan Wakil Ketua Bidang Politik dan Pemenangan Pemilu DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Hariyanto H menuturkan bahwasanya kepengurusan DPD PDI-P Jawa Tengah dari awal 2000 sampai saat ini mayoritas diisi oleh kader PDI-P yang telah menempuh kaderisasi berjenjang yang diatur dalam AD/ART partai. Kaderisasi yang ada tidak terlepas dari upaya penanaman nilai-nilai ideologis sesuai dengan ajaran Sukarno untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berorganisasi dan menjadi *guidance of life* masing-masing kader. Adapun materi kaderisasi yang diatur dalam AD/ART partai adalah sebagai berikut.

**Materi pengajaran ideologi yang bersifat utama terdiri dari :**

1. Indonesia Menggugat tahun 1930
2. Mencapai Indonesia Merdeka tahun 1930
3. Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945
4. Membangun Dunia Kembali 1960
5. Nawaksara tahun 1966
6. Pidato Ketua Umum

**Materi pengajaran ideologi yang bersifat pendukung terdiri dari :**

1. Kapitalisme Bangsa Sendiri tahun 1932
2. Amanat Presiden Sukarno tahun 1959
3. Amanat Presiden Sukarno 1960
4. Deklarasi Ekonomi 1963
5. Marhaenisme adalah Teori Perjuangan tahun 1965

Dari pedoman tentang materi pengajaran ideologi yang tertera diatas cukup kompleks untuk kemudian diresapi dan diterapkan secara praksis oleh para anggota maupun kader PDI-P. Dalam proses penerapan Pendidikan ideologi tersebut, partai memiliki alat kelengkapan berupa Badan Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT). DPD PDI-P memiliki BADIKLAT daerah dengan status alat kelengkapan partai ditingkat daerah yang diorganisir oleh DPD dengan fungsi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota maupun kader partai serta membuat sistem kualifikasi sistem kader.

Nilai-nilai ideologi partai yang dipegang oleh setiap kader maupun anggota tidak hanya berdampak pada organisasi partai yang bersangkutan. Namun terlihat pula pada kebijakan politik penyelenggara negara karena PDI-P sebagai organisasi politik mempunyai tugas untuk memperjuangkan kebijakan politik partai menjadi kebijakan politik penyelenggara negara. Hal tersebut dilakukan oleh para kader yang berproses di pemerintahan baik pusat maupun daerah dimana memiliki kewenangan dalam hal kebijakan.

Jembatan partai menuju ranah-ranah kebijakan tersebut adalah melalui fraksi yang merupakan salah satu alat kelengkapan partai. Adapun tugas fraksi sebagai alat kelengkapan partai adalah sebagai berikut :

1. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari partai yang merupakan barisan terdepan dan perpanjangan tangan partai di lembaga legislatif

2. Fraksi bertugas memperjuangkan kebijakan partai di lembaga legislatif agar menjadi kebijakan politik pemerintah
3. Fraksi melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi

Pergantian anggota legislatif partai (pergantian antar waktu) untuk DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi serta DPR-RI diputuskan dalam Rapat Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya dan harus mendapat persetujuan dari DPP Partai. Adapun fraksi dan pengurus fraksi ditetapkan oleh :

1. DPP parti untuk DPR-RI
2. DPD partai untuk DPRD Provinsi
3. DPC partai untuk DPRD Kabupaten/Kota

Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah terdiri dari para anggota DPRD Jawa Tengah yang diusung PDI-P. Pemilihan umum secara langsung pascareformasi yang dilaksanakan tahun 2004, 2009 dan 2014 telah memberikan kesempatan masyarakat Indonesia untuk dapat memilih secara langsung para wakilnya di parlemen dengan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL).

Adapun anggota fraksi PDI-P yang terebentuk pascareformasi hasil dari Pemilu langsung ditahun 2004 berjumlah 31 anggota, 2009 berjumlah 23 anggota dan 2014 berjumlah 27 anggota. Berikut adalah daftar nama anggota fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah.

**Table 2.6**  
**Daftar Anggota Fraksi PDI-P DPRD Jawa Tengah**

Masa Bakti 2004-2009	Masa Bakti 2009-2014	Masa Bakti 2014-2019
Murdoko, SH	Murdoko, SH	Dyah Kartika Permana Sari, MM
Drs. Djatmiko Wardoyo, M.Si	Rr. Maria Tri Mangesti, SE	Dede Indra Permana, SH
Drs. Sukimto	Hendrar Prihadi, SE, MM	Rr. Maria Tri Mangesti, SE
Hartati	Yanni Ernawati, SE	Mugiyono
Fatria Rahmadi, S.PI	Ir. Alwin Basri, MM	Ir. Alwin Basri, MM
Drs. HM. Supito, MM	Ayuning Sekar Suci, MA	Sarwono, SE
Drs. Sawidjan	Agus Wardoyo, SE	Ayuning Sekar Suci, MA
Septa Yuhardi	Ir. Joko Purnomo	Ir. Joko Purnomo, MH
Sarwono	Hari Pramono	Untung Wibowo S.
Agustina Wiludjeng P, SS	Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS	Ir. MG. Nuniek Sri Y, MS
Drs. Kenthut Wahyuni, SH	Budi Indarto, SE	Sumarji
Ir. Herry Sanyoto	Drs, Rukma Setyabudi, MM	Kadarwati, SH, MH
Ir. Agung Guntoro, MT	Peny Dyah P, S.Sos	Sumarsono, S.Sos
Slamet Wiryoatmojo	Bambang Haryanto B.	Ir. Didiek Hardiana P.
Mulyo Wirasmo	Sri Rumiati, SE, MM	Drs. Rukma Setyabudi, MM
Drs. Daniel Toto, M.Pd	Novita Wijayanti, SE, MM	Peny Dyah P, S.Sos
Drs. Rukma Setyabudi, MM	Samirun, SH, MH	Endrianingsing Yunita, SP
Bambang Raharjo, SP, MM	Asfirla Harisanto, SE	Sri Ruwiyati, SE, MM
Trisnanto Sri Hutomo, S.Pd	Drs. Kartomo, MM	Moch. Ichwan, SH
Wuwuh Beno Nugroho, SH	Sarei Abdul Rosyid, S.IP	Bambang Hariyanto B.
Subandi	Dr. Messy Widiastuti, MARS	Samirun, SH, MH
Bambang Haryanto	Adi Rustanto	Asfirla Harisanto, SE
Widyono, SE	Slamet Efendi, SE	Sarei Abdul Rosyid, S.IP
Novita Wijayanti, SE	Jumlah : 23 anggota	Dr. Messy Widiastuti, MARS
Mustofa S.		Irna Setiawati, SE
Drs. Maulen Sinaga, M.Si		Wahyudi Mas'ud
Sarei Abdul Rosyid, SIP		Ahmad ridwan, SE, MM
Drs. Kartomo, MM		Jumlah : 27 anggota
Tasroni Prayitno Budi		
Dulmanan		
Pujo Widiono		
Jumlah : 31 anggota		

Sumber : Sekretariat DPD PDI-P Jawa Tengah

Mereka yang juga berproses di fraksi PDI-P Jawa Tengah adalah orang-orang yang seharusnya memegang teguh nilai-nilai ideologi partai terlebih rata-rata dari mereka merangkap jabatan sebagai pengurus partai. Jadi dalam hal ini nilai ideologis akan tercermin dalam setiap tindakan yang diambil masing-masing kader maupun anggota PDI-P Jawa Tengah.